

PERJANJIAN

Pekerjaan Jasa Lainnya:

Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet

VSAT Ku-Band

76 Lokasi Non-Papua Dan Papua Barat

Nomor: 0204/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020

Nomor: K.TEL.66/HK.810/DGS-A1000000/2020

Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet VSAT Ku-Band untuk 76 (Tujuh Puluh Enam) Lokasi Non-Papua Dan Papua Barat berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020) antara:

- I. **Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**, suatu unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi.

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MUTSLA ADLAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen II berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, beralamat kantor di Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan.

Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- II. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan perubahan terakhir telah tercantum dalam Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta.

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MOHAMMAD SALSABIL**, selaku Executive Vice President Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 25 Maret 2014 dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Paraf: **PIHAK PERTAMA** 

PIHAK KEDUA: ... 

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu instansi/institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika berkaitan dengan pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* ("**KPU/USO**"), khususnya pelaksanaan penyediaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi;
- B. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf A, **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyediakan perangkat akses layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dan kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan di Republik Indonesia;
- C. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha yang telah menandatangani Kontrak Katalog tentang Penyediaan Jasa Layanan Akses Internet VSAT Nomor: 06/AI/ARIBA/BAKTI/KOMINFO/12/2018 dan Nomor: K.TEL.13554/HK.810/DGS-A1000000/2018 tertanggal 31 Desember 2018 antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** ("**Kontrak Katalog**") yang pelaksanaan pemilihannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
- D. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha yang telah memenuhi kualifikasi dan memiliki kemampuan untuk melakukan penyediaan akses internet dalam pelaksanaan KPU/USO sebagaimana dimaksud pada huruf B;
- E. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penyediaan akses internet di lokasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 2706/SP/PPK.1/BAKTI.31.9/KOMINFO/12/2019 tertanggal 27 Desember 2019;
- F. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat pelaksanaan penyediaan jasa layanan akses internet tunduk terhadap syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA: ...

OLEH KARENA ITU, disepakati syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi dan Dokumen Perjanjian

1. Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
 - a. **Availability** adalah jasa akses internet yang tersedia dan tercatat dalam NMS **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **Berita Acara Instalasi** adalah keterangan atas penyelesaian Pekerjaan Instalasi yang disusun sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perjanjian.
 - c. **Berita Acara Integrasi** adalah keterangan atas keberhasilan pelaksanaan Integrasi dan menjadi dasar dimulainya pelaksanaan Pekerjaan Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian.
 - d. **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi** adalah keterangan atas pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi per lokasi yang diterbitkan PPHP sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) Perjanjian dan disertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam dokumen penagihan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Perjanjian.
 - e. **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan** adalah keterangan atas pemeriksaan penyediaan Pekerjaan Layanan per lokasi untuk setiap bulan yang diterbitkan PPHP sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Perjanjian dan disertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam dokumen penagihan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (7) Perjanjian.
 - f. **Cidera Janji** adalah kegagalan salah satu **PIHAK** memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sesuai ketentuan dalam Pasal 25.
 - g. **Design Pack** adalah dokumentasi Layanan Akses Internet Pekerjaan Layanan yang terdiri atas *Global Design Pack*, *Site Design Pack* dan Laporan Instalasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini..
 - h. **Downtime** adalah waktu dimana perangkat *modem/router* tidak menyala atau tidak terdeteksi pada NMS.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- i. **Hak atas Kekayaan Intelektual** yang selanjutnya disebut **HaKI** adalah semua dan setiap hak dan kepentingan pada merek dagang yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, merek jasa, paten, desain yang sudah terdaftar, tanda pakai, aplikasi-aplikasi terhadap salah satu hal tersebut di atas, hak cipta (termasuk hak cipta yang akan datang) desain yang belum terdaftar, penemuan, informasi rahasia, keterampilan, rahasia dagang atau kekayaan intelektual lainnya (dalam bentuk tertulis atau dihasilkan oleh atau tersimpan pada komputer atau sistem serupa ataupun sebaliknya).
- j. **Harga** adalah nilai pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Perjanjian.
- k. **Informasi Rahasia** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 32 (Kerahasiaan) ayat (2).
- l. **Instalasi** adalah pemasangan perangkat termasuk namun tidak terbatas pada *modern/router* dan pelaksanaan Integrasi.
- m. **Integrasi** adalah terhubungnya informasi parameter dari lokasi perangkat akses internet yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA** dengan NMS **PIHAK PERTAMA** secara sistematis, sehingga **PIHAK PERTAMA** dapat mengetahui hidup atau matinya perangkat.
- n. **Keadaan Kahar** adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 23 (*Keadaan Kahar*) ayat (1) Perjanjian.
- o. **Kontrak Katalog** adalah sebagaimana didefinisikan pada huruf C dalam bagian pendahuluan Perjanjian.
- p. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau ditetapkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau dalam hal ini Direktur Utama BAKTI.
- q. **Laporan Layanan Bulanan** adalah keterangan atas penyediaan Pekerjaan Layanan per lokasi untuk setiap bulan yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian.
- r. **Lokasi** adalah posisi/tempat pelaksanaan Pekerjaan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- s. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- t. **Masa Trial** adalah periode masa uji coba Integrasi atas Pekerjaan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tidak memperhitungkan prestasi kerja.
- u. **Mean Time to Recovery** yang selanjutnya disebut **MTTR** adalah waktu toleransi yang diberikan untuk perbaikan dalam hal terjadi pergantian perangkat yang telah terdaftar pada NMS **PIHAK PERTAMA**.
- v. **Network Monitoring System** yang selanjutnya disebut **NMS** adalah system *monitoring* yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menghitung SLA **PIHAK KEDUA**.
- w. **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disebut dengan **PPHP** adalah panitia yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan.
- x. **Pekerjaan** adalah Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan.
- y. **Pekerjaan Instalasi** adalah pekerjaan pemasangan perangkat utama dan pendukung akses internet sampai dengan Integrasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- z. **Pekerjaan Layanan** adalah pekerjaan penyediaan jasa akses internet oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan spesifikasi dan Lokasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- aa. **Pengawas Pekerjaan** adalah satuan/unit/tim/individu dari **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- bb. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau dalam hal ini pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah. Menteri Komunikasi dan Informatika.
- cc. **Perjanjian** adalah sebagaimana didefinisikan pada bagian awal Perjanjian.
- dd. **Pihak Tertinggi Yang Berwenang** adalah kepala sekolah/ kepala desa/ pimpinan/ kepala instansi, termasuk penerima kuasanya yang berwenang pada Lokasi pelaksanaan Pekerjaan.
- ee. **Pihak Yang Mengalami Keadaan Kahar** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (*Keadaan Kahar*) ayat (3) Perjanjian.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- ff. **Prestasi Pekerjaan** adalah pencapaian Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan yang telah layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** setiap bulan.
 - gg. **Relokasi** adalah perubahan Lokasi Pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi tertentu dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - hh. **Sensor SNMP Uptime** adalah sensor yang berisi informasi berapa lamanya perangkat *far-end* atau perangkat di titik terjauh dari alat pengukuran SLA atau NMS **PIHAK PERTAMA**
 - ii. **Service Level Agreement** yang selanjutnya disebut **SLA** adalah acuan tingkat layanan yang harus dicapai oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan, dan terdiri dari SLA I, dan SLA II, serta sebagai menjadi acuan dalam pembayaran Prestasi Pekerjaan.prestasi bulanan.
 - jj. **Travel Time to Recovery** yang selanjutnya disebut **TTR** adalah waktu perjalanan ke Lokasi yang dibutuhkan untuk pergantian perangkat yang telah terdaftar pada NMS **PIHAK PERTAMA**.
 - kk. **Uptime** adalah waktu dimana perangkat *modem/router* menyala dan terdeteksi pada NMS.
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian:
- a. Adendum Perjanjian dan lampiran-lampirannya (apabila ada);
 - b. Perjanjian ini; dan
 - c. Lampiran-lampirannya.
3. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (2) di atas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK KEDUA wajib melakukan penyediaan jasa akses internet kepada **PIHAK PERTAMA** (termasuk pihak lain yang ditunjuk untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA**) dengan sejumlah *bandwidth* internet dan jenis teknologi yang digunakan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*) dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan berakhirnya seluruh periode Penyediaan Jasa pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal dari tanggal berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pasal 29 mengenai Pengakhiran Perjanjian.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnnya dalam 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Untuk menghindari keragu – ragan, **PARA PIHAK** akan menandatangani addendum Perjanjian dalam melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 4

Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet

Pekerjaan penyediaan Jasa Akses Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pekerjaan Instalasi (apabila ada); dan
- b. Pekerjaan Layanan.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

Pasal 5

Pekerjaan Instalasi

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan dan menyelesaikan Pekerjaan Instalasi pada Lokasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*).
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan kemajuan Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK PERTAMA** setiap diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi per Lokasi, dengan ketentuan jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*); dan
 - b. Capaian pelaksanaan Pekerjaan Instalasi per Lokasi yang disertai dengan dokumen pendukung berupa foto dan/atau bentuk dokumen lainnya yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Selain menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian Pekerjaan Instalasi dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan Pihak Tertinggi Yang Berwenang yang sekurang-kurangnya memuat lampiran berupa:
 - a. Bukti foto Pekerjaan Instalasi yang dilengkapi dengan informasi *geotagging*;
 - b. UAT (*User Acceptance Test*); dan
 - c. *Design Pack*.
4. **PIHAK KEDUA** sepakat apabila **PIHAK KEDUA** gagal menyelesaikan Pekerjaan Instalasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) yang dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan tidak memerlukan Pekerjaan Instalasi atau perangkat untuk pelaksanaan Pekerjaan Layanan telah dilakukan Pekerjaan Instalasi sebelum penandatanganan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** melakukan pelaksanaan Integrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian. Untuk menghindari keraguan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima kompensasi apapun dari **PIHAK PERTAMA** terhadap perangkat yang telah dilakukan Pekerjaan Instalasi sebelum penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 6

Pekerjaan Layanan

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan dan menyelesaikan Pekerjaan Layanan yang terhitung sejak tanggal Berita Acara Integrasi sampai dengan selesainya Masa Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan Layanan dengan SLA untuk setiap Lokasi/bulan sebesar 97%.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Layanan Bulanan antara lain memuat lampiran sebagai berikut:
 - a. Dokumen laporan kapasitas transponder (VSAT) per Lokasi;
 - b. Laporan performansi per bulan dari NMS;
 - c. Laporan pemeliharaan dan rencana jadwal pemeliharaan;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diberikan **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Data pendukung lainnya dari **PIHAK KEDUA** yang juga tercatat di NMS.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** gagal mencapai SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Layanan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan pengurangan pembayaran prestasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 7

NETWORK MONITORING SYSTEM (NMS)

1. Perhitungan pencapaian SLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan data yang tercantum pada NMS.
2. Perhitungan SLA pada NMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SLA I dan SLA II.
3. SLA I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persentase hasil analisa *Sensor SNMP Uptime* yang diperoleh dari hasil akumulasi antara nilai persentase *Uptime* dari *SNMP System Uptime* dengan *Downtime* dari sistem *SNMP System Uptime* yang merupakan peristiwa *Downtime* akibat masalah kelistrikan yang teridentifikasi pada data di NMS.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

4. SLA II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah *Downtime* dari hasil analisa *Sensor SNMP Uptime* yang tidak teridentifikasi pada SLA I akibat terjadinya pemeliharaan terjadwal (*preventive maintenance*), *MTTR* dan/atau *TTR*, yang dibuktikan oleh dokumen pendukung yang tercatat di sistem monitoring **PIHAK PERTAMA**.
5. Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** dapat mengakses (*view only*) *network management system* dan *alert system* **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Pemeliharaan (*Maintenance*)

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeliharaan perangkat *remote* dan *backhaul* (*preventive maintenance*) secara berkala minimal 1x (satu) kali selama Masa Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan rencana prosedur dan jadwal pemeliharaan perangkat *remote* dan *backhaul* kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai perubahan konfigurasi sistem atau perangkat yang terjadi setelah dilakukan pemeliharaan yang dituangkan pada laporan pasca pemeliharaan.

Pasal 9

Pengawasan dan Inspeksi

1. Pengawasan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau **PIHAK PERTAMA** secara langsung.
2. Apabila dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan, maka Pengawas Pekerjaan berkewajiban bertindak untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dalam mengawasi Pekerjaan tersebut.
3. **PIHAK PERTAMA**, baik bersama Pengawas Pekerjaan atau tidak, dapat melakukan inspeksi ke setiap Lokasi pelaksanaan Pekerjaan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**. Untuk tujuan tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses penuh dan memadai bagi **PIHAK PERTAMA** (termasuk Pengawas Pekerjaan atau pihak lain bersamanya) untuk memasuki bagian manapun dari Lokasi Pekerjaan.
4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kekurangan/ketidaksesuaian pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki, melengkapi, dan/atau mengganti terhadap kekurangan/ketidaksesuaian tersebut selambat – lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal inspeksi.

Pasal 10

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemeriksaan atas hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
2. Pemeriksaan hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA** ini dilakukan oleh PPHP.
3. PPHP melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan.
4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Instalasi telah selesai 100% (seratus per seratus) per Lokasi;
 - b. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi.
5. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Layanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Layanan telah dilaksanakan;
 - b. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pemeriksaan hasil Pekerjaan Layanan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Dibuktikan dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3);
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Layanan, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan.
6. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dokumen administrasi, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
7. **PIHAK PERTAMA** melakukan penerimaan Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan Instalasi dan Pekerjaan Layanan per Lokasi untuk setiap bulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan diterima oleh PPHP.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: ... 

Pasal 11

Evaluasi Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pengawas Pekerjaan dapat melakukan penilaian *Availability* atas Pekerjaan Layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Penilaian oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan langsung terhadap *Availability* pada masing-masing Lokasi setiap bulannya selama Masa Perjanjian.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga performansi Pekerjaan Layanan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan memberikan laporan performansi **PIHAK KEDUA** di luar Laporan Layanan Bulanan kepada **PIHAK PERTAMA** jika sewaktu-waktu diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan berita acara verifikasi kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV

PERUBAHAN PEKERJAAN, RELOKASI, DAN KONFIGURASI INTERNAL

Pasal 12

Perubahan Pekerjaan

1. **PARA PIHAK** sepakat dapat melakukan perubahan atas Pekerjaan apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kondisi Lokasi dengan spesifikasi teknis sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 (*Spesifikasi Teknis dan Gambar*), dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan dan bukan disebabkan karena Cidera Janji oleh salah satu **PIHAK**.
2. Perubahan Pekerjaan dapat dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian;
 - b. mengurangi atau menambah jenis Pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi Pekerjaan sesuai dengan kondisi Lokasi.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

3. Dalam hal perubahan Pekerjaan merupakan penambahan atas Pekerjaan dan berimplikasi terhadap penambahan Harga, maka perubahan Pekerjaan dimaksud harus mempertimbangkan tersedianya anggaran **PIHAK PERTAMA** dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Harga yang telah ditetapkan sebelum terjadinya penambahan Pekerjaan.
4. Jika diperlukan perubahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan perintah perubahan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kemudian dilakukan negosiasi terhadap teknis dan harga sesuai dengan Perjanjian.
5. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara negosiasi perubahan Pekerjaan dan menjadi dasar untuk melakukan adendum Perjanjian.

Pasal 13

Relokasi

1. **PIHAK PERTAMA** dapat memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perpindahan Lokasi atas Pekerjaan.
2. Relokasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian Pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan usulan Relokasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan kondisi operasional, kondisi keamanan, kondisi kelistrikan, utilisasi yang rendah, dan/atau kondisi lainnya yang secara wajar mempengaruhi kinerja Pekerjaan Layanan **PIHAK KEDUA**.
4. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pembahasan biaya yang timbul akibat Relokasi, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** hanya menanggung biaya yang timbul akibat Relokasi sebagai berikut:
 - a. Apabila biaya perjalanan pengiriman perangkat VSAT ke lokasi baru;
 - b. Apabila jarak dari 1 lokasi eksisting ke lokasi baru berpindah kabupaten/kota.
5. Dalam hal usulan dan biaya Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menerbitkan perintah tertulis untuk pelaksanaan Relokasi kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Atas Pekerjaan yang dilakukan Relokasi sesuai dengan Pasal 13 Ayat (4) huruf b, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan perpanjangan waktu kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

7. Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan adendum Perjanjian.

Pasal 14

Konfigurasi Internal

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan perubahan konfigurasi internal dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal perubahan konfigurasi internal oleh **PIHAK PERTAMA** mengakibatkan penurunan SLA atas Pekerjaan Layanan **PIHAK KEDUA**, maka penurunan SLA tersebut bukan merupakan kondisi pengurang pembayaran prestasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Perjanjian ini.

BAB V

SUMBER PENDANAAN, HARGA, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENANGGUHAN

Pasal 15

Sumber Pendanaan

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) **PIHAK PERTAMA** pada tahun berjalan.

Pasal 16

Harga

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa harga pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp17.054.400.000,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** sebagaimana dirinci dalam Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*).
2. Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meliputi:
 - a. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% (PPN);
 - b. Pekerjaan Instalasi dan/atau pengirimannya (apabila ada);
 - c. Prestasi Pekerjaan, sudah termasuk seluruh perangkat, keuntungan, beban pajak-pajak terkait, *overhead*, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perawatan.

Paraf: **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA:

3. Dalam hal terjadi perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga, maka **PARA PIHAK** akan mendiskusikan kembali pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk perhitungan harga yang tercantum dalam Kontrak Katalog.
4. Dalam hal **PARA PIHAK** menyetujui perhitungan ulang mengenai Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** akan melakukan perhitungan ulang atas Harga untuk periode yang tersisa selama Masa Perjanjian.
5. Perubahan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menjadi dasar adendum Perjanjian dan perjanjian terkait lainnya.

Pasal 17

Ketentuan Umum Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran atas Prestasi Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
2. Prestasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Prestasi Pekerjaan Instalasi (apabila ada); dan
 - b. Prestasi Pekerjaan Layanan.

Pasal 18

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Instalasi

1. Pembayaran atas prestasi Pekerjaan Instalasi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan:
 - a. Diberikan satu kali untuk instalasi setiap Lokasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 (*Pekerjaan Instalasi*) dan Pasal 10 (*Pemeriksaan Hasil Pekerjaan*);
 - b. Diberikan untuk setiap instalasi Relokasi yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 (*Relokasi*);
 - c. Dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - d. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan tagihan Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi yang diterbitkan oleh PPHP;
 - e. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi Pekerjaan Instalasi;
 - f. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak, dan uang retensi; dan

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- g. Untuk Perjanjian yang menggunakan subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyertakan dokumen penagihan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermaterai);
 - c. *Invoice* 2 (dua) rangkap;
 - d. Rekapitulasi tagihan biaya pengiriman per Lokasi;
 - e. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
 - f. Copy NPWP;
 - g. Ringkasan Perjanjian;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi; dan
 - i. Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
3. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
4. Pembayaran Pekerjaan Instalasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nomor Rekening	:	103.000.691.7989
Nama Bank	:	Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang
Nama Rekening	:	Telekomunikasi Indonesia

Pasal 19

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Layanan

1. Pembayaran prestasi Pekerjaan Layanan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pencapaian SLA.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 6, **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran SLA I atas Pekerjaan Layanan kepada **PIHAK KEDUA** dengan tunduk terhadap ketentuan sebagai berikut:

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- a. SLA I \geq 97%, prestasi Pekerjaan Layanan per Lokasi dibayarkan 100%;
 - b. SLA I < 97%, prestasi Pekerjaan Layanan per Lokasi dibayarkan berdasarkan data yang diperoleh dari NMS; dan/atau
 - c. SLA I < 1%, prestasi Pekerjaan Layanan per lokasi tidak dapat dibayarkan dan tidak membutuhkan dokumen pendukung.
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran SLA II atas Pekerjaan Layanan per Lokasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak meminta pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas kegiatan persiapan Pekerjaan yang meliputi kegiatan:
- a. Proses Integrasi; dan/atau
 - b. Masa Trial dikenakan selama 3 (tiga) hari kalender setelah proses Integrasi selesai dilaksanakan.
5. Pembayaran atas Pekerjaan Layanan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dilakukan pembayaran setiap bulan;
 - b. Biaya sewa bulanan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan SLA per Lokasi terhadap Jaringan Akses Internet yang telah terintegrasi dan terealisasi secara proposional dihitung sejak tanggal Integrasi dengan perangkat **PIHAK PERTAMA** atau setelah selesai Masa Trial (apabila ada) sesuai dengan cara perhitungan yang diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.
6. Biaya sewa bulanan atas Pekerjaan Layanan dihitung berdasarkan SLA I dan SLA II dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. $\text{Pembayaran SLA I} = \frac{\text{Jumlah Hari Layanan}}{\text{Jumlah hari bulan}} \times \text{Harga Sewa Bulanan} \times \% \text{SLA I}$
 - b. $\text{Pembayaran SLA II} = \frac{\text{Jumlah Hari Layanan}}{\text{Jumlah hari bulan}} \times \text{Harga Sewa Bulanan} \times \% \text{SLA II}$
7. **PIHAK KEDUA** harus menyertakan dokumen penagihan pembayaran sewa bulanan prestasi Pekerjaan Layanan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermeterai);

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- c. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - d. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
 - e. Copy NPWP;
 - f. Ringkasan Perjanjian;
 - g. Rekapitulasi penagihan pembayaran per Lokasi;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan; dan
 - i. Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
8. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran atas penagihan Pekerjaan Layanan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
9. Pembayaran Pekerjaan Layanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nomor Rekening	:	103.000.691.7989
Nama Bank	:	Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang
Nama Rekening	:	Telekomunikasi Indonesia

Pasal 20

Penangguhan

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan setiap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** melakukan Cidera Janji atas Perjanjian, termasuk penyerahan setiap hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, termasuk pemberian jangka waktu perbaikan (apabila diperlukan).
3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

BAB VI

PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAKI

Pasal 21

Pernyataan Dan Jaminan

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewenangan dan kapasitas hukum dalam melakukan penandatanganan Perjanjian ini untuk dan atas nama BAKTI, serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian ini;
 - b. Semua tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini dan transaksi yang direncanakan di dalamnya telah diambil dan berlaku dengan penuh dan mutlak kecuali sejauh tindakan yang oleh ketentuan-ketentuan dokumen-dokumen tersebut harus diambil di lain waktu dan kecuali sejauh bahwa keefektifan dokumen lain dikondisikan atas keefektifan dari Perjanjian ini.
 - c. Penyelenggaraan, penyampaian dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** telah diberi kuasa atas seluruh tindakan yang diperlukan, dan tidak akan melanggar ketentuan apa pun dari, atau merupakan kelalaian dalam, perjanjian atau instrumen lain (yang mana ia merupakan pihak) atau yang dapat mengikatnya.
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas terorganisir dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini (yang mana dirinya sebagai pihak) dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan Perjanjian.;
 - b. **PIHAK KEDUA** telah memperoleh persetujuan, izin, dan lisensi yang dibutuhkan dan cakap secara hukum untuk mengikatkan diri, menandatangani Perjanjian ini, termasuk untuk melaksanakan, mematuhi, dan memenuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini;
 - c. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari **PIHAK KEDUA**, sehingga seluruh ketentuan di dalam Perjanjian ini mengikat **PIHAK KEDUA** secara hukum;

Paraf: **PIHAK PERTAMA** 

PIHAK KEDUA: ... 

- d. Tidak ada tindakan, tuntutan, atau proses hukum yang tertunda atau menurut pengetahuan **PIHAK KEDUA** mengancam atau mempengaruhi **PIHAK KEDUA** dimuka pengadilan atau badan administratif, atau majelis arbitrase yang dapat memberikan dampak yang merugikan secara materiil bagi **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- e. Penandatanganan Perjanjian ini tidak atau tidak akan melanggar hukum, anggaran dasar **PIHAK KEDUA**, dan/atau perjanjian apapun dimana **PIHAK KEDUA** menjadi pihak di dalamnya;
- f. **PIHAK KEDUA** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan, gugatan, dan/atau klaim apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan Perjanjian ini apabila tuntutan, gugatan, dan/atau klaim tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau tindakan tidak berbuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. **PIHAK KEDUA** telah membaca dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan tersebut dengan itikad baik.

Pasal 22

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- 1. Setiap HaKI yang dibawa dan/atau dihasilkan oleh masing – masing **PIHAK** ("HaKI Bawaan") dalam pelaksanaan Perjanjian ini, tetap merupakan milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, **PIHAK** tersebut harus memastikan bahwa HaKI Bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI pihak lain.
- 2. Setiap hasil penelitian, baik merupakan HaKI, data dan informasi yang dihasilkan secara bersama-sama dari pelaksanaan Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.
- 3. Setiap pemanfaatan HaKI dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, akan diatur secara tersendiri dalam perjanjian HaKI dan/atau perjanjian kerja sama lainnya antara **PARA PIHAK**.
- 4. Setiap publikasi data dan informasi dari hasil pelaksanaan Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama, kecuali disepakati secara tertulis dari pihak lain untuk dilaksanakan secara tersendiri. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 23

Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam ketentuan ini adalah suatu peristiwa yang (i) terjadi di luar kendali yang wajar dari PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (ii) tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat dicegah atau dihindari oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iii) secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iv) PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah, menangani, atau mengambil tindakan alternatif untuk menghindari peristiwa yang terjadi, (v) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja oleh PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar, dan/atau (vi) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung, disebabkan karena kegagalan PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("Keadaan Kahar").
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa Keadaan Kahar:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai/tornado, atau banjir besar;
 - b. Kebakaran yang terjadi atas perangkat Pekerjaan yang bukan disebabkan karena kelalaian oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Perang, baik yang dideklarasikan atau tidak, invasi, gencatan senjata, dan merupakan perang nasional ataupun daerah;
 - d. Kerusuhan, pemberontakan, revolusi, sabotase, aksi terorisme;
 - e. Pemogokan karyawan yang bukan disebabkan oleh salah satu **PIHAK**;
 - f. Wabah penyakit yang menghambat pelaksanaan Pekerjaan.
3. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ("**PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar**") melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya bahwa telah terjadi peristiwa Keadaan Kahar paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.

4. Dalam hal Keadaan Kahar dinyatakan secara resmi oleh pihak/instansi yang berwenang, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dari **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pertemuan dan pembahasan upaya perbaikan untuk mengurangi dampak kerugian Keadaan Kahar selambat – lambatya dalam 14 (empat belas) hari sejak menerima pemberitahuan.
6. Kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian dapat ditangguhkan selama terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, dan tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab terhadap **PIHAK** lainnya selama terjadinya Keadaan Kahar.
7. Kegagalan atau keterlambatan oleh **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** dalam memenuhi kewajibannya tidak akan ditangguhkan sepanjang hal tersebut disebabkan karena kelalaian atau kegagalan **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** untuk melaksanakan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian ini atau kerusakan atau kegagalan fasilitas atau perangkat dan peralatan yang disebabkan oleh penggunaan normal atau kegagalan dalam menjaga dengan benar fasilitas atau peralatan dan perangkat tersebut.
8. Keadaan Kahar tidak menangguhkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pekerjaan yang telah tercapai sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

BAB VIII

CIDERA JANJI, SANKSI, DENDA KETERLAMBATAN DAN PERISTIWA KOMPENSASI

Pasal 24

Cidera Janji

1. Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK KEDUA** terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan Pekerjaan dan/atau melakukan Pekerjaan tapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- b. **PIHAK KEDUA** gagal memperoleh, memiliki, dan/atau mendapatkan perizinan, persetujuan, lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pemberitahuan-pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pembayaran atas denda atau biaya lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar, serta menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai selama pelaksanaan Perjanjian ini;
 - f. **PIHAK KEDUA** terbukti secara sah melalui suatu putusan lembaga peradilan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. **PIHAK KEDUA** melakukan penyimpangan prosedur dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - h. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK PERTAMA** terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar;
 - b. **PIHAK PERTAMA** lalai atau gagal dalam melakukan pembayaran atas Pekerjaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** dinyatakan lengkap dan benar; dan/atau
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) terjadi, **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji menyampaikan pemberitahuan Cidera Janji kepada **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji secara segera.

4. **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji wajib menyampaikan rencana upaya perbaikan Cidera Janji kepada **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal rencana upaya perbaikan Cidera Janji disetujui oleh **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji secara tertulis.
6. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal untuk melakukan upaya perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji berhak melakukan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 25

Sanksi

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi administratif kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** gagal melakukan perbaikan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5).
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara transaksi *e-Purchasing*;
 - b. pemutusan perjanjian payung/ Kontrak Katalog/ pencantuman **PIHAK KEDUA** dari katalog elektronik;
 - c. Pengakhiran Perjanjian ini; atau
 - d. Pelaporan terhadap instansi terkait lainnya.
3. Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam pengadaan Pekerjaan selanjutnya.

Pasal 26

Denda Keterlambatan Instalasi

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atas jadwal penyelesaian Pekerjaan Instalasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan per lokasi sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga Pekerjaan Instalasi per lokasi yang terdapat pada Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*) sampai dengan penyelesaian Pekerjaan Instalasi.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

2. Penyelesaian Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi.

Pasal 27

Peristiwa Kompensasi

1. **PIHAK KEDUA** dapat menerima kompensasi apabila terjadi peristiwa sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan jadwal yang mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan melakukan perubahan spesifikasi atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
 - c. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan Relokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13;
 - d. Terjadinya Keadaan Kahar terhadap salah satu **PIHAK**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** terlambat melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - g. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengatasi kondisi tertentu lainnya yang disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang belum ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** berhak menerima kompensasi dalam bentuk:
 - a. Pengeluaran tambahan; dan/atau
 - b. Perpanjangan jangka waktu Pekerjaan.
3. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk pengeluaran tambahan, maka setiap peristiwa kompensasi **PIHAK KEDUA** yang berdampak terhadap pengeluaran tambahan harus mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu dan pengeluaran tambahan tersebut tidak melebihi 10% dari harga yang disepakati pada awal Perjanjian.
4. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, maka setiap peristiwa kompensasi **PIHAK KEDUA** yang berdampak terhadap perpanjangan jangka waktu Pekerjaan harus mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.
5. Pengeluaran tambahan hanya dapat dibayarkan jika terdapat kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengeluaran tambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu Pekerjaan akibat dari terjadinya peristiwa kompensasi menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan amandemen atau adendum Perjanjian.

BAB IX

PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

Pengakhiran Perjanjian

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir apabila tercapainya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian dan **PARA PIHAK** sepakat tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:
 - a. Apabila terjadi Keadaan Kahar lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari kerja;
 - b. Cidera Janji yang gagal diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (6) Perjanjian; dan/atau
 - c. **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit.
3. Tunduk terhadap ketentuan pada ayat (2), **PIHAK** yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
4. Dalam hal pada saat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat pembayaran yang tertunda dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang memiliki tunggakan pembayaran wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada saat tanggal efektif pengakhiran.
5. Pembayaran yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pembayaran pencapaian Prestasi Pekerjaan terakhir oleh **PIHAK PERTAMA**, denda keterlambatan yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul dari Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh dalam hal putusan pengadilan diperlukan untuk suatu pemutusan Perjanjian.

Pasal 29

Penyelesaian Sengketa

1. **PARA PIHAK** dengan itikad baik harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka penyelesaian sengketa antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mengurus bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
4. Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, Jakarta, yang keputusannya mengikat **PARA PIHAK** sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. **PARA PIHAK** setuju bahwa jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan majelis arbitrase.

BAB X

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 30

Kepemilikan Dokumen

1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan serta dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini akan beralih kepada **PIHAK PERTAMA** dan sepenuhnya merupakan hak milik **PIHAK PERTAMA**.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

2. **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada saat pengakhiran Perjanjian berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut.
3. Seluruh rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, baik selama jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian dokumen dan informasi kepada pihak ketiga lainnya sebelum mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 31

Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan, permohonan, permintaan, izin, persetujuan atau pengumuman lainnya kepada atau dari **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila dikirimkan dengan surat tercatat, faksimili, surat elektronik, disampaikan langsung disertai dengan tanda terima atau dikirimkan ke alamat sebagaimana disebut dalam Pasal ini.
2. Apabila salah satu **PIHAK** dalam perjanjian ini mengubah alamatnya, maka ia harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai perubahan tersebut menurut ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat tersebut efektif. Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu **PIHAK** dalam memberitahukan hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat atau lalai.
3. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung (wajib disertai dengan tanda terima) dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Perjanjian atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**. Setiap pemberitahuan/korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan atau sejak tanggal pengiriman surat elektronik apabila dikirim melalui surat elektronik dan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

4. Alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi
Alamat : Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan I No. 2
Jakarta 10110
Telepon : 021-31936590
Website : Baktikominfo.id
Faksimilasi : 021-31935916

PIHAK KEDUA

Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Alamat : Menara Multimedia, Jalan Kebon
Sirih No. 12, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : 021 – 80675600
Faksimili : 021 – 3845933
Website : www.telkom.co.id
Email : dhoni@telkom.co.id

Pasal 32

Kerahasiaan

1. **PARA PIHAK** harus menjaga secara ketat kerahasiaan atas seluruh informasi rahasia yang disampaikan oleh **PIHAK** lainnya.
2. Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan informasi rahasia berarti setiap informasi dalam bentuk apa pun, terkait dengan ruang lingkup Perjanjian (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), pemberi informasi atau anak-anak perusahaan, yang diperoleh oleh penerima informasi, para direktornya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini, dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital) dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan pemberi informasi ("Informasi Rahasia").

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku:
- i. Jika **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh proses peradilan, administratif atau proses hukum lain (termasuk dalam kaitannya untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan menurut Perjanjian ini dari instansi-instansi) atau oleh hukum yang berlaku;
 - ii. Jika diperlukan informasi tersebut diungkapkan untuk tujuan penyelesaian sengketa;
 - iii. Jika dokumen atau informasi tersebut:
 - a. sebelumnya telah diketahui oleh **PIHAK** yang menerima dokumen atau informasi;
 - b. telah diketahui oleh masyarakat umum (baik sebelum atau setelah pemberian dokumen atau informasi) bukan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK** yang menerima dokumen atau informasi; atau
4. Setiap **PIHAK** harus segera mengembalikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lainnya setelah ada permintaan tertulis dari **PIHAK** lainnya tersebut. Jika suatu **PIHAK** tidak menerima permintaan untuk mengembalikan Informasi Rahasia, **PIHAK** tersebut dapat menghancurkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut.
5. Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik dari **PIHAK** yang memberikannya, kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 33

Keterpisahan

Jika ada suatu Pasal, klausa, bagian atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat. Ketentuan yang hanya sebagian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan tetap berlaku secara efektif sepanjang menyangkut hal-hal yang sah atau dapat dilaksanakan. Dalam hal demikian, **PARA PIHAK** akan mengubah Perjanjian ini dan menggantikan Pasal yang tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin dengan ketentuan atau tujuan semula.

Pasal 34

Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini, berikut dengan lampiran-lampirannya, merupakan suatu kesepakatan yang utuh antara **PARA PIHAK** berkaitan dengan pekerjaan. Segala korespondensi, dokumen, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan atau tertulis, antara **PARA PIHAK** menyangkut pekerjaan digantikan dengan Perjanjian ini.

Pasal 35

Perubahan/ Penambahan Perjanjian

1. Segala perubahan dan/atau perpanjangan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Segala penambahan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam suatu addendum Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perubahan/ penambahan Perjanjian yang dapat dilaksanakan apabila disetujui tertulis oleh **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. perubahan pekerjaan yang disebabkan perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi dengan gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Perjanjian dan bukan karena Cidera Janji;
 - b. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian bukan karena Cidera Janji, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian;
 - c. perubahan lokasi pekerjaan atau Relokasi yang disebabkan oleh hal-hal tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan hanya dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Perjanjian;
 - d. perubahan harga disebabkan karena perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh pada terhadap perhitungan harga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Perjanjian;

- e. perubahan peristiwa kompensasi karena **PIHAK PERTAMA** memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasi kondisi yang belum ditentukan dalam Perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 Perjanjian;
 - f. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau Relokasi;
 - g. perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena Keadaan Kahar;
 - h. perubahan nilai Perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau perubahan harga; dan
 - i. perubahan ketentuan Perjanjian lainnya.
4. Untuk kepentingan perubahan Perjanjian, PA/KPA dapat membentuk panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan perjanjian atas usul **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 36

Pengesampingan

- 1. Kegagalan suatu **PIHAK** untuk menuntut pemenuhan yang tegas atas suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan hak untuk menuntut pemenuhan atas ketentuan tersebut atau atas ketentuan-ketentuan yang lain.
- 2. Pengesampingan oleh suatu **PIHAK** atas suatu Cidera Janji atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan, syarat, kondisi, Cidera Janji atau pelanggaran lainnya dari Perjanjian ini.
- 3. Keterlambatan dalam melaksanakan dan pelaksanaan penuh atau sebagian oleh suatu **PIHAK** atas suatu hak, upaya hukum, atau wewenang berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan seutuhnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak, upaya hukum atau wewenang tersebut.
- 4. Suatu pengesampingan harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dari **PIHAK** yang melakukan pelepasan hak tersebut.

Pasal 37

Hak Pihak Ketiga

Perjanjian ini tidak memberikan setiap hak, manfaat atau dasar bertindak apapun untuk kepentingan setiap subyek hukum yang bukan merupakan **PIHAK** dalam Perjanjian ini, kecuali sebagaimana secara tegas diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 38

Tidak Ada Kemitraan atau Keagenan

Perjanjian ini tidak menciptakan suatu perhimpunan, usaha patungan atau kemitraan antara **PARA PIHAK** atau membentuk atau mewajibkan didirikannya suatu kemitraan. Kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, suatu **PIHAK** tidak berhak untuk menyetujui suatu kewajiban untuk, atau bertindak atas nama, atau bertindak sebagai agen atau perwakilan, atau dengan cara lain mengikat, **PIHAK** lainnya.

Pasal 39

Hukum yang Mengatur

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk segala tujuan harus dipandang secara konklusif sebagai suatu perjanjian Indonesia.

Pasal 40

Audit Pemerintah

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh Pekerjaan dan pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tunduk terhadap audit yang akan dilakukan oleh institusi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang akan dilakukan selama Masa Perjanjian atau setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
2. Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** sepakat dan berjanji akan mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** jumlah kelebihan pembayaran sesuai dengan hasil audit tersebut sesuai dengan jangka waktu sebagaimana terdapat dalam berita acara pengembalian kelebihan pembayaran.
3. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal 40 ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Masa Perjanjian.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

Pasal 41

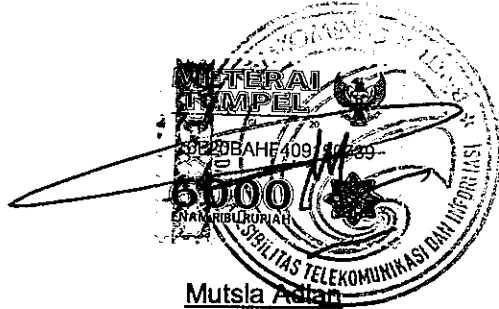
Penutup

Demikian Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Untuk dan atas nama

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi

PIHAK PERTAMA



Mutsia Adnan

Pejabat Pembuat Komitmen II

Untuk dan atas nama

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA



Executive Vice President

Divisi Government Service


LAMPIRAN 1

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BANDWIDTH	HARGA SATUAN (Rp)	DURASI LAYANAN (BULAN)	TOTAL HARGA (Rp)
1	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	TEMPAT WISATA AIR TERJUN JANJI	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
2	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	HOME STAY TIPANG	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
3	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	GAZEBO DESA TIPANG	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
4	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	TEMPAT WISATA SIPINSUR	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
5	JAWA BARAT	BANDUNG	KP.SIMPANG RAWABOGO	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
6	JAWA TENGAH	WONOGIRI	SD N 1 WONOHARJO	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
7	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	HOME STAY DESA MARBUN TONGA MARBUN DOLOK	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
8	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	HOME STAY DESA MARBUN TORUAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
9	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	HOME STAY DESA SIMAMORA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
10	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	RESTORAN APUNG TIPAS MAS	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000


Paraf:  PIHAK PERTAMA:
 PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BANDWIDTH	HARGA SATUAN (Rp)	DURASI LAYANAN (BULAN)	TOTAL HARGA (Rp)
11	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	TEMPAT WISATA ISTANA RAJA SISIMANGARAJA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
12	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	TEMPAT WISATA TOMBAK SULU-SULU	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
13	JAWA BARAT	BANDUNG	POS KAMLING SELOPURO	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
14	JAWA TENGAH	BLORA	MTS. HASYIM ASY'ARI SUMBER	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
15	JAWA TENGAH	BLORA	PONDOK PESANTREN AL-MUHTAR SARIMULYO	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
16	JAWA TENGAH	PATI	PON PES MANBAUL ULUM	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
17	JAWA TENGAH	PATI	BALAI DESA SUKOBUBUK	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
18	JAWA TENGAH	REMBANG	MADR.SU'AIBIYAH	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
19	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS.AL MADINAH	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
20	JAWA TENGAH	REMBANG	SMP NU PANCUR	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
21	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS.HIDAYATUL MUBTADIIN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
22	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS. MIFTAHUL ULUM	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
23	JAWA TENGAH	PATI	POSKO KARANG TARUNA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000

Paraf: PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BANDWIDTH	HARGA SATUAN (Rp)	DURASI LAYANAN (BULAN)	TOTAL HARGA (Rp)
24	JAWA TENGAH	REMBANG	WISATA KARANGJAHE	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
25	JAWA TENGAH	WONOGIRI	KANTOR DESA JATEN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
26	JAWA TENGAH	WONOGIRI	BALAI PERTEMUAN SUMBER	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
27	JAWA TENGAH	WONOGIRI	BALAI PERTEMUAN BONGOS	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
28	JAWA TENGAH	WONOGIRI	MASJID	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
29	JAWA TENGAH	WONOGIRI	SDN 01 NGAMBARSAARI	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
30	JAWA TENGAH	WONOGIRI	SEKERTARIAT KELOMPOK TANI ARGO LESTARI	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
31	JAWA TENGAH	WONOGIRI	MASJID AL AMIN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
32	JAWA TENGAH	WONOGIRI	LAPANGAN BOLA VOLI	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
33	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	PUSKESMAS HU'U	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
34	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	PUSKESMAS PAJO	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
35	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	PUSKESMAS PEKAT	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
36	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	PUSKESMAS KEMPO	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BANDWIDTH	HARGA SATUAN (Rp)	DURASI LAYANAN (BULAN)	TOTAL HARGA (Rp)
37	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	PUSKESMAS KILO	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
38	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	TPA RAUDLATUL FATAH	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
39	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	SEKERTARIAT PAC ANSOR BATUR	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
40	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	SEKERTARIAT MWC NU WANAYASA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
41	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	MA. NURUL HIKMAH	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
42	JAWA TENGAH	KEBUMEN	SEKERTARIAT MWCNU ADIMULYO	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
43	JAWA TENGAH	KEBUMEN	KANTOR DESA BINANGUN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
44	JAWA TENGAH	KEBUMEN	BALAI DESA KALIGUBUG	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
45	JAWA TENGAH	KEBUMEN	BALAI DESA RAHAYU	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
46	JAWA TENGAH	KEBUMEN	SD NEGERI 4 SELOGIRI	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
47	JAWA TENGAH	KEBUMEN	TPA BAITUL HUDA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
48	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU GUNUNGWULED	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
49	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU KARANGNANGKA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000

Paraf: PIHAK PERTAMA:
PIHAK KEDUA:
PIHAK KEDUA:
PIHAK KEDUA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BANDWIDTH	HARGA SATUAN (Rp)	DURASI LAYANAN (BULAN)	TOTAL HARGA (Rp)
50	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU 1 TANGKISAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
51	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	PEMDES PEKALONGAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
52	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU 2 PENGADEGAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
53	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MTS MA'ARIF NU SIWARAK	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
54	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU KABUNDERAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
55	BANTEN	SERANG	MIRU PABUARAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
56	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA PANTAI CERMIN KANAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
57	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA SEMENTARA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
58	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA PANTAI CERMIN KIRI	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
59	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA LUBUK SABAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
60	JAWA BARAT	BANDUNG	PAUD NURUL IMAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
61	JAWA BARAT	BANDUNG	KANTOR BPD / DESA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
62	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	PAUD KOBER MIFTAHUL FALAH	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000

Paraf:  PIHAK KEDUA:

Paraf:  PIHAK PERTAMA:

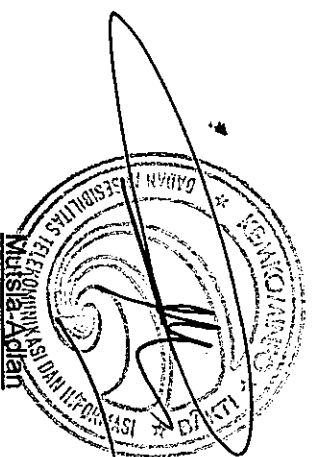
Pejabatian Kerja Sama
 Nomor: 0204/PKS/PRK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020
 Nomor: K.TEL.66/HK.810/DGS-41000000/2020

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BANDWIDTH	HARGA SATUAN (Rp)	DURASI LAYANAN (BULAN)	TOTAL HARGA (Rp)
76	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	SMK N. 01 SIMPANG RENGGIANG	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
TOTAL								17.054.400.000

Untuk dan atas nama

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

PIHAK PERTAMA

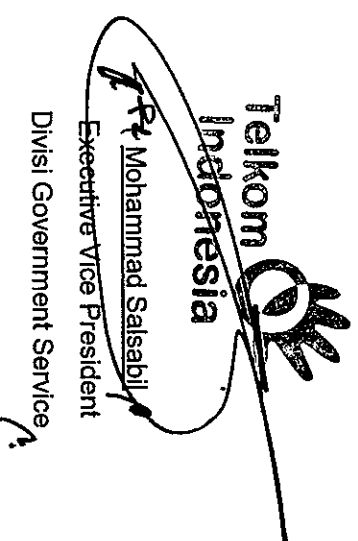


Pejabat Pembuat Komitmen II
 Murtisa Adlan

Untuk dan atas nama

Perusahaan Perseroan (Persero)
 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA



Executive Vice President
 Divisi Government Service

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BANDWIDTH	HARGA SATUAN (Rp)	DURASI LAYANAN (BULAN)	TOTAL HARGA (Rp)
63	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	KOBER AL FURQON	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
64	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	SMA NEGERI 01 PARIT TIGA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
65	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	SMK NEGERI 1 KELAPA	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
66	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMK TUKAK SADAI	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
67	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 01 PAYUNG	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
68	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 01 AIR GEGAS	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
69	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 02 TOBOALI	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
70	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMA N. 02 PUDING BESAR	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
71	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMK N. 01 BAKAM	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
72	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMA NEGERI 1 PUDING BESAR	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
73	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMAN 1 RIAU SILIP	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
74	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	SMA N. 01 LUBUK BESAR	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000
75	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	SMA N. 01 SUNGAI SELAN	VSAT KU-BAND	4 Mbps	18.700.000	12	224.400.000

Panah: **PIHAK PERTAMA**.....

PIHAK KEDUA.....

LAMPIRAN 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN INSTALASI

No	Provinsi	Kabupaten	Nama Lokasi	ISP	Teknologi	Tanggal On Air
1	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	TEMPAT WISATA AIR TERJUN JANJI	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
2	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	HOME STAY TIPANG	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
3	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	GAZEBO DESA TIPANG	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
4	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	TEMPAT WISATA SIPINSUR	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
5	JAWA BARAT	BANDUNG	KP.SIMPANG RAWABOGO	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
6	JAWA TENGAH	WONOGIRI	SD N 1 WONO HARJO	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
7	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	HOME STAY DESA MARBUN TONGA MARBUN DOLOK	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
8	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	HOME STAY DESA MARBUN TORUAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
9	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	HOME STAY DESA SIMAMORA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
10	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	RESTORAN APUNG TIPAS MAS	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
11	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	TEMPAT WISATA ISTANA RAJA SISIMANGARAJA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
12	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDUTAN	TEMPAT WISATA TOMBAK SULU- SULU	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
13	JAWA BARAT	BANDUNG	POS KAMLING SELOPURO	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
14	JAWA TENGAH	BLORA	MTS. HASYIM ASY'ARI SUMBER	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
15	JAWA TENGAH	BLORA	SARIMULYO	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
16	JAWA TENGAH	PATI	PON PES MANBAUL ULUM	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
17	JAWA TENGAH	PATI	BALAI DESA SUKOBUBUK	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
18	JAWA TENGAH	REMBANG	MADR.SU'ABIBYAH	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
19	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS.AL MADINAH	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
20	JAWA TENGAH	REMBANG	SMP NU PANCUR	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
21	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS.HIDAYATUL MUHTADIN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
22	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS. MIFTAHUL ULUM	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
23	JAWA TENGAH	PATI	POSKO KARANG TARUNA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
24	JAWA TENGAH	REMBANG	WISATA KARANGJAHE	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
25	JAWA TENGAH	WONOGIRI	KANTOR DESA JATEN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
26	JAWA TENGAH	WONOGIRI	BALAI PERTEMUAN SUMBER	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
27	JAWA TENGAH	WONOGIRI	BALAI PERTEMUAN BONGOS	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
28	JAWA TENGAH	WONOGIRI	MASJID	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
29	JAWA TENGAH	WONOGIRI	SDN 01 NGAMBAR SARI	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
30	JAWA TENGAH	WONOGIRI	ARGO LESTARI	TELKOM	VSAT KU-BAND	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA:

31	JAWA TENGAH	WONOGIRI	MASJID AL AMIN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
32	JAWA TENGAH	WONOGIRI	LAPANGAN BOLA VOLI	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
33	BARAT	DOMPU	PUSKESMAS HUJU	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
34	BARAT	DOMPU	PUSKESMAS PAJO	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
35	BARAT	DOMPU	PUSKESMAS PEKAT	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
36	BARAT	DOMPU	PUSKESMAS KEMPO	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
37	BARAT	DOMPU	PUSKESMAS KILO	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
38	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	TPA RAUDLATUL FATAH	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
39	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	SEKERTARIAT PAC ANSOR BATUR	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
40	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	SEKERTARIAT MWC NU WANAYASA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
41	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	MA. NURUL HIKMAH	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
42	JAWA TENGAH	KEBUMEN	SEKERTARIAT MWCNU ADIMULYO	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
43	JAWA TENGAH	KEBUMEN	KANTOR DESA BINANGUN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
44	JAWA TENGAH	KEBUMEN	BALAI DESA KALIGUBUG	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
45	JAWA TENGAH	KEBUMEN	BALAI DESA RAHAYU	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
46	JAWA TENGAH	KEBUMEN	SD NEGERI 4 SELOGIRI	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
47	JAWA TENGAH	KEBUMEN	TPA BAITUL HUDA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
48	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU GUNUNGWULED	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
49	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU KARANGNANGKA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
50	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU 1 TANGKISAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
51	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	PEMDES PEKALONGAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
52	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU 2 PENGADEGAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
53	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MTS MA'ARIF NU SIWARAK	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
54	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU KABUNDERAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
55	BANTEN	SERANG	MIRU PABUARAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
56	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	CERMIN KANAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
57	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA SEMENTARA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
58	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	CERMIN KIRI	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
59	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA LUBUK SABAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
60	JAWA BARAT	BANDUNG	PAUD NURUL IMAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
61	JAWA BARAT	BANDUNG	KANTOR BPD / DESA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
62	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	PAUD KOBER MUFTAHUL FALAH	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
63	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	KOBER AL FURQON	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
64	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	SMA NEGERI 01 PARIT TIGA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
65	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT	SMK NEGERI 1 KELAPA	TELKOM	VSAT KU-BAND	-


Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA:

66	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMK TUKAK SADAI	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
67	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 01 PAYUNG	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
68	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 01 AIR GEGAS	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
69	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 02 TOBOALI	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
70	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMA N. 02 PUDING BESAR	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
71	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMK N. 01 BAKAM	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
72	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMA NEGERI 1 PUDING BESAR	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
73	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMAN 1 RIAU SILIP	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
74	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	SMA N. 01 LUBUK BESAR	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
75	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	SMA N. 01 SUNGAI SELAN	TELKOM	VSAT KU-BAND	-
76	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	SMK N. 01 SIMPANG RENGSIANG	TELKOM	VSAT KU-BAND	-

Untuk dan Atas Nama Badan Aksesibilitas
 Telekomunikasi dan Informasi

PIHAK PERTAMA



Mutsia Adnan
 Pejabat Pembuat Komitmen II

Untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan
 (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

PIHAK KEDUA



**Telkom
Indonesia**
Mohammad Salsabil
 Executive Vice President
 Divisi Government Services

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

LAMPIRAN 3 PENANGANAN GANGGUAN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Lokasi	Teknologi	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	MTTR Perkejaian (Menit)	Travel Time to Recovery Perkejaian (Menit)
1	SUMATERA UTARA	HUMBANG	TEMPAT WISATA AIR TERJUN JANJI	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
2	SUMATERA UTARA	HUMBANG	HOME STAY TIPANG	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
3	SUMATERA UTARA	HUMBANG	GAZEBO DESA TIPANG	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
4	SUMATERA UTARA	HUMBANG	TEMPAT WISATA SIPINSUR	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
5	JAWA BARAT	BANDUNG	KP.SIMPANG RAWABOGO	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
6	JAWA TENGAH	WONOGIRI	SD N 1 WONOHARJO	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
7	SUMATERA UTARA	HUMBANG	HOME STAY DESA MARBUN TONGA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
8	SUMATERA UTARA	HUMBANG	MARBUN DOLOK	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
9	SUMATERA UTARA	HUMBANG	HOME STAY DESA MARBUN TORUAN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
10	SUMATERA UTARA	HUMBANG	HOME STAY DESA SIMAMORA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
11	SUMATERA UTARA	HUMBANG	RESTORAN APUNG TIPAS MAS	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
12	SUMATERA UTARA	HUMBANG	TEMPAT WISATA ISTANA RAJA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
13	SUMATERA UTARA	HUMBANG	SISIMANGARAJA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
14	SUMATERA UTARA	HUMBANG	TEMPAT WISATA TOMBAK SULU	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

13	JAWA BARAT	BANDUNG	POS KAMUNG SELOPURO	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
14	JAWA TENGAH	BLORA	MTS. HASYIM AS'ARI SUMBER	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
15	JAWA TENGAH	BLORA	PONDOK PESANTREN AL-MUHTAR SARIMULO	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
16	JAWA TENGAH	PATI	PON PES MANBAUL ULUM	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
17	JAWA TENGAH	PATI	BALAI DESA SUKOBUBUK	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
18	JAWA TENGAH	REMBANG	MADR.SU'ALIRYAH	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
19	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS.AL MADINAH	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
20	JAWA TENGAH	REMBANG	SMP NU PANCUR	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
21	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS.HIDAYATUL MUBTADIIN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
22	JAWA TENGAH	REMBANG	MTS. MIFTAHUL ULUM	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
23	JAWA TENGAH	PATI	POSKO KARANG TARUNA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
24	JAWA TENGAH	REMBANG	WISATA KARANGLAHE	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
25	JAWA TENGAH	WONOGIRI	KANTOR DESA JATEN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
26	JAWA TENGAH	WONOGIRI	BALAI PERTEMUAN SUMBER	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
27	JAWA TENGAH	WONOGIRI	BALAI PERTEMUAN BONGOS	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
28	JAWA TENGAH	WONOGIRI	MASIJD	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
29	JAWA TENGAH	WONOGIRI	SDN 01 NGAMBARSAARI SEKERTARIAT KELOMPOK TANI ARGO LESTARI	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
30	JAWA TENGAH	WONOGIRI	MASIJD AL AMIN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
31	JAWA TENGAH	WONOGIRI	LAPANGAN BOLA VOLI	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
32	JAWA TENGAH	WONOGIRI	PUSKESMAS HU'U	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	366
33	JAWA TENGAH	DOMPU	PUSKESMAS PAJO	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	366
34	JAWA TENGAH	DOMPU	PUSKESMAS PEKAT	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	366
35	JAWA TENGAH	DOMPU	PUSKESMAS KEMPO	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	366
36	JAWA TENGAH	DOMPU	TPA RAUDLATUL FATAH	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
37	JAWA TENGAH	DOMPU	SEKERTARIAT PAC ANSOR BATUR	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
38	JAWA TENGAH	DOMPU	SEKERTARIAT MWC NU WANAYASA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
39	JAWA TENGAH	DOMPU		VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
40	JAWA TENGAH	DOMPU		VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

41	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	MA. NURUL HIKMAH	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
42	JAWA TENGAH	KEBUMEN	SEKRETARIAT MWCNU ADIMULYO	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
43	JAWA TENGAH	KEBUMEN	KANTOR DESA BINANGUN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
44	JAWA TENGAH	KEBUMEN	BALAI DESA KALUGUBUG	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
45	JAWA TENGAH	KEBUMEN	BALAI DESA RAHAYU	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
46	JAWA TENGAH	KEBUMEN	SD NEGERI 4 SELOGIRI	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
47	JAWA TENGAH	KEBUMEN	TPA BATUL HUDA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
48	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU GUNUNGWULED	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
49	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU KARANGMANGKA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
50	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU 1 TANGKISAN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
51	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	PEWDES PEKALONGAN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
52	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU 2 PENGADegan	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
53	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MTS MA'ARIF NU SIWARAK	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
54	JAWA TENGAH	PURBALINGGA	MI MA'ARIF NU KABUNDERAN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
55	BANTEN	SERANG	MIRU PABUARAN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
56	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA PANTAI CEMIN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	120
57	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA SEMENTARA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	120
58	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA PANTAI CEMIN KIRI	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	120
59	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	KANTOR KEPALA DESA LUBUK SABAN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	120
60	JAWA BARAT	BANDUNG	PAUD NURUL IMAN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
61	JAWA BARAT	BANDUNG	KANTOR BPD / DESA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
62	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	PAUD KOBER MITRAHUL FALAH	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
63	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	KOBER AL FURQON	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	360
64	KEPULAUAN BANGKA	BANGKA BARAT	SMA NEGERI 01 PARIT TIGA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
65	KEPULAUAN BANGKA	BANGKA BARAT	SMK NEGERI 1 KELAPA	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

66	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMK TUKAK SDAI	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
67	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 01 PAYUNG	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
68	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 01 AIR GEGAS	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
69	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN	SMA N. 02 TOBOALI	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
70	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMA N. 02 PUDING BESAR	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
71	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMK N. 01 BAKAM	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
72	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMA NEGERI 1 PUDING BESAR	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
73	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA	SMAN 1 RIAU SIUP	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
74	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	SMA N. 01 LUBUK BESAR	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
75	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	SMA N. 01 SUNGAI SELAN	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240
76	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	SMK N. 01 SIMPANG RENGIANG	VSAT KU-BAND	02/01/2020	31/12/2020	180	240

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 